

A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan di lapangan. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila pelaksanaannya tidak didukung oleh komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta adanya komitmen dari para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, implementasi menjadi bagian yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Edward III, 1980). Implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dalam siklus kebijakan yang dimulai dari perumusan dan identifikasi masalah hingga pelaksanaan kebijakan di lapangan. Implementasi kebijakan menjadi tahap krusial dalam proses pembuatan kebijakan karena menentukan keberhasilan kebijakan yang telah dirumuskan (Alifiani et al., 2024).

Implementasi program kebijakan adalah sebuah proses penting yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan, yang dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan program di tingkat lokal (Sutikno et al., 2023). Implementasi kebijakan sekolah Adiwiyata dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, dukungan pelaksana, serta struktur birokrasi yang berjalan dengan baik (Priantari, 2021). Implementasi program kebijakan lingkungan menuntut adanya pengelolaan yang terstruktur, komunikasi yang efektif, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal agar tujuan program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan (Faiqotunnisa et al., 2024).

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang bersifat hierarkis serta peran para pengambil keputusan dalam merealisasikan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan implementasi kebijakan menuntut aparat pemerintah untuk membangun dan memanfaatkan jejaring dengan para pemangku kepentingan serta kelompok terkait lainnya agar kebijakan dapat dijalankan secara kolaboratif. Melalui kerja sama tersebut, kebijakan yang diterapkan diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam proses pelaksanaannya (Edward III, 1980). Dalam Program Adiwiyata, keempat

aspek tersebut menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana program dapat dijalankan secara efektif di tingkat sekolah. Program ini juga menuntut kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari internal sekolah maupun eksternal seperti pemerintah daerah, agar pelaksanaannya berjalan optimal (Nuzulia et al., 2019).

Isu lingkungan hidup kini telah menjadi perhatian global yang sangat mendesak, termasuk di dunia pendidikan. Di Indonesia, kualitas sanitasi dan tata kelola lingkungan sekolah yang masih rendah terus menjadi tantangan karena berdampak langsung pada kesehatan serta mutu belajar siswa. Sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peduli lingkungan sejak usia dini. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan Program Sekolah Adiwiyata sebagai proses pembelajaran dan pembiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah (BPS, 2024).

Berbagai kendala terkait lingkungan masih sering dijumpai di area sekolah, seperti rendahnya kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta kurangnya pembiasaan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis, melainkan harus diwujudkan melalui program sekolah yang terintegrasi secara berkelanjutan agar dapat membentuk perilaku yang nyata dan berkesinambungan.

Krisis lingkungan global yang kian memburuk merupakan bagian dari tantangan perubahan iklim yang diamanatkan dalam target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-13 (United Nations, 2023). Sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peduli lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan Program Sekolah Adiwiyata sebagai upaya menciptakan sekolah berbudaya lingkungan melalui kebijakan, kurikulum, kegiatan partisipatif, dan pengelolaan sarana ramah lingkungan (KLHK, 2024). Keberhasilan implementasi Program Adiwiyata dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan serta pengelolaan sarana dan prasarana ramah lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. (Pradini et al., 2019). Program Adiwiyata merupakan Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang diselenggarakan secara nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan tujuan menanamkan

budaya peduli lingkungan secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan Program Adiwiyata dilakukan secara berjenjang dan terstruktur, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sebagai tahap awal, kemudian meningkat ke tingkat Provinsi dan Nasional, hingga mencapai tingkat tertinggi yaitu Adiwiyata Mandiri bagi sekolah yang mampu mempertahankan serta mengembangkan inovasi lingkungan dan membina sekolah lain. Program ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, monitoring, evaluasi, serta pemberian penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan capaian sekolah (KLHK, 2024).

Transformasi budaya dan perilaku warga sekolah merupakan poin utama dari Program Adiwiyata, selain pembenahan kondisi fisik lingkungan. Implementasi program ini mencakup kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan partisipatif, serta pengelolaan sarana prasarana. Namun, pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak optimal karena dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik masing-masing sekolah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya meneliti dinamika implementasi program untuk memahami berbagai faktor pendukung sekaligus tantangan yang dihadapi sekolah dalam prosesnya (Nuzulia et al., 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Program Adiwiyata mampu membentuk perilaku peduli lingkungan peserta didik melalui kegiatan berbasis lingkungan di sekolah. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan Adiwiyata dan dampaknya terhadap perilaku siswa, sedangkan kajian mengenai implementasi kebijakan Program Adiwiyata menggunakan model implementasi Edward III pada jenjang sekolah dasar masih jarang. Selain itu, studi tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi program di tingkat sekolah dasar, khususnya di Kabupaten Banyumas, juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai proses implementasi Program Adiwiyata di SD Negeri Kembaran.



Gambar 1. Sekolah SD Negeri Kembaran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sekolah Adiwiyata di SD Negeri Kembaran dengan menekankan pada proses pelaksanaan dan dinamika yang terjadi selama program dijalankan. SD Negeri Kembaran merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan Program Adiwiyata dan memperoleh penghargaan tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Penghargaan Adiwiyata tersebut memuat empat komponen utama, yaitu kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan partisipatif, serta pengelolaan sarana.

Kebijakan ini dijalankan di tingkat daerah melalui peraturan kepala daerah. Contohnya adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/187 Tahun 2025 tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 mengenai Pelaksanaan Program Adiwiyata, yang didukung oleh pemerintah. Namun, pelaksanaan program ini masih menemui berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi yang optimal antar pihak terkait.

Tabel 1. Data Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Urutan	Nama Sekolah
1.	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	1	MTs N 1 Banjarnegara
2.	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	2	MTs N 2 Banjarnegara
3.	Kabupaten Banjarnegara	Pagedongan	3	SMP N 3 Pagedongan
4.	Kabupaten Banjarnegara	Pagentan	4	SMP N 1 Pagentan

5.	Kabupaten Banjarnegara	Purwareja Klampok	5	SMP N 3 Purwareja Klampok
6.	Kabupaten Banjarnegara	Sigaluh	6	SMP N 1 Sigaluh
7.	Kabupaten Banjarnegara	Susukan	7	SMP N 1 Susukan
8.	Kabupaten Banyumas	Kembaran	1	SD N Kembaran
9.	Kabupaten Banyumas	Purwokerto Selatan	2	SD IT Harapan Bunda
10.	Kabupaten Banyumas	Purwokerto Timur	3	SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01
11.	Kabupaten Banyumas	Sumpiuh	4	SMA N 1 Sumpiuh
12.	Kabupaten Batang	Subah	1	SD N Tenggulangharjo
13.	Kabupaten Batang	Tersono	2	SDN Rejosari 01
14.	Kabupaten Batang	Warungasem	3	SMP N 2 Warungasem
15.	Kabupaten Batang	Bandar	4	SD N Wonosegoro 01
16.	Kabupaten Blora	Cepu	1	SMP N 2 Cepu
17.	Kabupaten Blora	Tunjungan	2	SD IT Permata Mulia
18.	Kabupaten Boyolali	Ampel	1	SMP Tahfidzul Qur'an Abi-Ummi
19.	Kabupaten Boyolali	Boyolali	2	SMP N 2 Boyolali
20.	Kabupaten Boyolali	Boyolali	3	SMK N 1 Boyolali
21.	Kabupaten Boyolali	Teras	4	SMA N 1 Teras
22.	Kabupaten Brebes	Bantarkawung	1	SMA N 1 Bantarkawung
23.	Kabupaten Brebes	Brebes	2	SMP N 5 Brebes
24.	Kabupaten Brebes	Jatibarang	3	SMP N 1 Jatibarang
25.	Kabupaten Brebes	Ketanggungan	4	SD Muhammadiyah Ketanggungan

Sumber : Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/187 Tahun 2025 Tentang Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Dalam dokumen keputusan itu, SD Negeri Kembaran tercantum dalam lampiran sebagai salah satu sekolah penerima penghargaan yang mewakili Kabupaten Banyumas, bersama sekolah-sekolah lain dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan sekolah dalam memenuhi

standar Adiwiyata, seperti penerapan kebijakan ramah lingkungan, kurikulum yang berfokus pada lingkungan, serta keterlibatan aktif warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan.

Tabel 2. Program Sekolah Adiwiyata SD Negeri Kembaran Tahun 2024

No	Komponen Adiwiyata	Program Implementasi Di SD Negeri Kembaran
1	Kebijakan Berwawasan Lingkungan	1. Visi Misi Lingkungan 2. Aturan Kebersihan Hari Tanpa Sampah 3. Rencana Kerja Sekolah Berbasis Lingkungan
2	Kurikulum Berbasis Lingkungan	1. Integrasi Tema Lingkungan 2. P5 Gaya Hidup Berkelanjutan 3. Modul Ajar Lingkungan
3	Kegiatan Partisipatif	1. Kerja Bakti 2. Jumat Bersih 3. Kunjungan Lingkungan 4. Gelar Karya
4	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Sekolah	1. Tempat Sampah Terpilah 2. Taman Sekolah 3. Bank Sampah 4. Pojok Hijau

Sumber: Data Survei Diolah Oleh Penulis

Program Sekolah Adiwiyata di SD Negeri Kembaran dilaksanakan melalui empat komponen utama, yaitu kebijakan berwawasan lingkungan yang tercermin dalam visi misi serta aturan sekolah tentang kebersihan dan perilaku peduli lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan yang diintegrasikan dalam pembelajaran dan proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) seperti pengelolaan sampah, kegiatan partisipatif yang melibatkan warga sekolah dan masyarakat melalui kerja bakti, kunjungan edukatif, serta Gelar Karya Siswa, dan pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelaksanaan program Adiwiyata serta memperkuat kesadaran ekologi dan partisipasi warga sekolah dalam menjaga lingkungan (Listyana et al., 2020).

Selain berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, Program Adiwiyata juga memberikan dampak langsung kepada peserta didik sebagai sasaran utama kebijakan. Melalui berbagai kegiatan lingkungan seperti pemilahan sampah, penghijauan sekolah, kerja bakti, dan pemanfaatan barang bekas, siswa memperoleh pengalaman belajar yang bersifat praktis sehingga mampu menumbuhkan karakter disiplin, tanggung jawab, kerja sama, serta kepedulian terhadap lingkungan. Pembiasaan tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga berpotensi terbawa ke kehidupan sehari-hari siswa di rumah dan masyarakat sehingga mendukung pembentukan perilaku ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Program Adiwiyata di SD Negeri Kembaran dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan teori Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai factor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program di lingkungan sekolah.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, peneliti akan merencanakan, menjalankan, menganalisis dan melaporkan hasil penelitian dengan proses penelitian yang dilengkapi dengan pertanyaan tertulis maupun lisan yang disiapkan dan diajukan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan SD Negeri Kembaran.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung mengenai kebijakan yang sudah dibentuk dengan pihak terkait yaitu Kepala Penata Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, wawancara dengan pelaksana kebijakan yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Kembaran, Tenaga Pendidik atau Guru, wawancara dengan penerima kebijakan yaitu siswa dan wali murid atau orang tua. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,